

Judul : RUU Kepariwisataan jadi Payung Hukum Kembangkan Wisata
Tanggal : Kamis, 02 Oktober 2025
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

RUU Kepariwisataan Jadi Payung Hukum Kembangkan Wisata

WAKIL Ketua Komisi VII DPR Chusnunia Chalim mengungkapkan, Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Kepariwisataan bakal disahkan hari ini. Aturan ini diharapkan jadi payung hukum pengembangan potensi wisata di Tanah Air.

Chusnunia menjelaskan, hari ini (Kamis 1/10/2025) merupakan Penutupan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026. Karena itu, pengesahan RUU Kepariwisataan krusial agar Komisi VII DPR bisa melanjutkan pembahasan RUU lain di masa sidang berikutnya.

"RUU Kepariwisataan telah tuntas di tingkat I setelah disetujui anggota dan fraksi partai politik yang ada di Komisi VII DPR," terang Chusnunia di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Dia bilang, RUU Kepariwisataan memuat sejumlah substansi penting yang menjadi perhatian Komisi VII DPR. Mulai dari kewajiban Pemerintah Daerah menyusun rencana induk pengembangan pariwisata, penguatan promosi melalui kelembagaan, hingga peningkatan kualitas SDM dan dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat.

"RUU ini juga menegaskan prinsip pariwisata berkelanjutan, keterlibatan masyarakat lokal, serta perlindungan hu-

kum bagi investor dengan kepastian perizinan yang sesuai tata ruang," kata politikus PKB itu.

Sebagai Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Kepariwisataan, dia berharap pengesahan *beleid* ini akan menciptakan keberpihakan anggaran. Sehingga sektor pariwisata mendapat perhatian yang lebih besar, sejalan dengan kontribusinya terhadap perekonomian nasional.

Melalui UU Kepariwisataan yang baru, sektor pariwisata Tanah Air akan menghadirkan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, kelestarian alam, dan keadilan sosial. "Selain itu juga inovasi berbasis teknologi sangat penting agar pariwisata Indonesia mampu bersaing di era global," katanya.

Harapan senada diungkapkan Ketua Komisi VII DPR Saleh Partaonan Daulay. Komisi VII, kata dia, berharap RUU Kepariwisataan mampu menjadi payung hukum bagi pengembangan pariwisata Indonesia. Pasalnya, potensi pengembangan ekonomi sangat terbuka luas di bidang pariwisata.

"Karena itu, secara regulasi semua instrumen sudah diperkuat di dalam UU. Masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi penuh," terang wakil ketua umum PAN itu. ■ PYB